

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN  
PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN,  
KEMISKINAN, DAN PDB TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA  
PERIODE 1992-2012**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**ASTRI WINARTI**  
**NIM. 12020110110022**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2014**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Astri Winarti

Nomor Induk Mahasiswa : 12020110110022

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi  
Pembangunan

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN  
PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN,  
KEMISKINAN, DAN PDB TERHADAP  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI  
INDONESIA PERIODE 1992-2012**

Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si

Semarang, 17 November 2014

Dosen Pembimbing,

(Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si)

NIP. 197107251997022001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Astri Winarti

Nomor Induk Mahasiswa : 12020110110022

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi  
Pembangunan

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN  
PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN,  
KEMISKINAN, DAN PDB TERHADAP  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI  
INDONESIA PERIODE 1992-2012**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 November 2014**

Tim Penguji :

1. Evi Yulia Purwanti S.E., M.Si (.....)
2. Drs. H. Edy Yusuf AG, M.Sc., Ph.d (.....)
3. Achma Hendra Setiawan, S.E., M.Si (.....)

Mengetahui, 27 November 2014

Pembantu Dekan 1

Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt)

NIP 19670809 199203 1001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Astri Winarti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulisan lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 17 November 2014

Yang membuat pernyataan,

(Astri Winarti)

NIM: 12020110110022

## **ABSTRACT**

*The low quality of human resources is a major problem in Indonesia. The quality of human resources in Indonesia is still low, as indicated by Human Development Index (HDI) which ranks 121<sup>st</sup> out of 187 countries and in position 6<sup>th</sup> of the 10 ASEAN countries. The low quality of human resources in Indonesia is caused by poor public education that result in the low productivity, the average wage, and the high level of poverty that causes people not be able to fulfill their needs.*

*The purpose of this research is to analyze the factors that influence to HDI in Indonesia. In analyzing this research, the writer applied multiple linear regression models with a simple least squares method or the Ordinary Least Squares (OLS). The data used in this research are time series data in the period of 1992 to 2012.*

*The result shows that the poverty variable has negative and significant influence to human development index in Indonesia; therefore, the decline in poverty rate will increase HDI in Indonesia. GDP has positive and significant influence to human development index in Indonesia, which means when the GDP increases, the HDI will increase as well. On the other side, the government spending on education variable has negative and not significant influence to human development index in Indonesia, this happens because 20% of government spending is not only allocated to education but also allocated for other expenses such as employee salaries and other education expense. So that an increase in government spending every year shows no significant effect to human development index.*

*Keywords : Human Development Index (HDI), Government spending on education, Poverty, and GDP*

## ABSTRAK

Rendahnya kualitas sumber daya manusia masih menjadi masalah utama di Indonesia. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang masih rendah sebagaimana ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia yang menempati urutan ke 121 dari 187 Negara dan berada di posisi ke 6 dari 10 negara ASEAN. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia disebabkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan rata-rata upah pekerja dan masih tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan metode kuadrat terkecil sederhana atau *Ordinary Least Squares* (OLS). Data yang digunakan adalah data time series periode 1992-2012.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, maka menurunnya tingkat kemiskinan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, yang berarti PDB meningkat maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat. Sedangkan variabel anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, hal ini terjadi karena pengeluaran pemerintah sebesar 20% tidak dialokasikan semuanya untuk pendidikan tetapi juga dialokasikan untuk lainnya seperti gaji pegawai dan biaya pendidikan lainnya. Sehingga peningkatan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Kata kunci : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, Kemiskinan, dan PDB.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dengan baik.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak pihak yang telah berperan memberikan bimbingan, bantuan, dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hadi Sasana, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
2. Ibu Evi Yulia Purwanti, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih atas bimbingan, solusi, kesabaran, dan waktu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Darwanto SE, M.Si, selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dalam kegiatan akademis selama penulis belajar di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
4. Para Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Diponegoro.

5. Keluargaku, Bapak dan Mamah, Kakak-kakakku terima kasih atas kepercayaan, dukungan, materi, kasih sayang, dan doa yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang kalian berikan dan selalu berada dalam lindungan-Nya. Amin.
6. Kinanti dan Icha. Terimakasih atas kerjasamanya selama ini, sehingga penulis bisa mendapatkan uang jajan tambahan untuk hidup di daerah perantauan. Semoga *Smgkpoptrip* tetap berjaya.
7. *Ulzzang Girls* dan *Proud Fangirls*. Anna, Kinanti, Kiky, Dinda, Dita, Ayu Minos, Naomi, Dian, Pipit, Riza, Melia, Terimakasih telah membuat kehidupan penulis menjadi lebih berwarna. Semoga kita bisa bertemu dengan *bias* masing-masing.
8. Dian dan Pipit. Terimakasih telah menjadi keluarga ketika penulis berada di daerah perantauan.
9. Nisa dan Ayu. Terimakasih telah menjadi sahabat yang baik, selalu membantu penulis ketika dalam kesusahan.
10. Geng undur-undur yang selalu setia datang ke perpustakaan setiap hari. Tetap semangat kita semua pasti bisa.
11. Teman-teman Esdal Kendal (Yani, Rahmi, Desi, Ghalib, Ian, Aang, Bang Risky, Tyo) terima kasih atas kenangan manis yang telah diberikan, tetap kompak terus.
12. Teman-teman IESP 2010, Terimakasih telah menjadi bagian dari kehidupan penulis dan membuat suasana kuliah menjadi berwarna selama 4 tahun di bangku perkuliahan, sukses selalu untuk kita semua.



13. Teman-teman Samulnori dan Kimchi. Terimakasih atas semua kenangan manis yang telah kalian berikan. Semoga kita semua bisa pergi ke Korea.  
Amin

14. Terakhir untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang akan digunakan demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi teman-teman dan pembaca lainnya.

Semarang, 17 November 2014

Penulis

Astri Winarti

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	12
1.3.1 Kegunaan Penelitian .....	12
1.4 Sistematika Penulisan .....	13
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	15
2.1 Landasan Teori .....	15
2.1.1 Pertumbuhan Baru .....	15
2.1.2 Teori <i>Human Capital</i> .....	18
2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia .....	22
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah .....	28
2.1.5 Kemiskinan .....	34
2.1.6 Produk Domestik Bruto (PDB) .....	38
2.2 Penelitian Terdahulu .....	43
2.3 Kerangka Pemikiran .....	46
2.4 Hipotesis .....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	49
3.1.1 Variabel Penelitian.....	49
3.1.2 Definisi Operasional Variabel .....	49
3.2 Jenis dan Sumber data .....	50
3.3 Metode Pengumpulan data .....	51
3.4 Metode Analisis.....	52
3.4.1 Regresi Linier Berganda.....	52
3.4.2 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	53
3.4.3 Uji Statistik .....	55
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	59
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	59
4.2 Analisis Data .....	71
4.3 Interpretasi Hasil .....	80
BAB V PENUTUP.....	83

5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	84
5.3 Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 IPM Indonesia Tahun 1980-2012 .....	3
Tabel 1.2 Nilai dan Peringkat IPM Negara-Negara ASEAN Tahun 2012 .....	4
Tabel 1.3 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Pendidikan, 2007-2013.....	6
Tabel 1.4 PDB Per kapita dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Negara-Negara ASEAN .....	7
Tabel 1.5 PDB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2004-2012.....	10
Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM.....	27
Tabel 4.1 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Indonesia, 2010 .....	61
Tabel 4.2 Angka Buta Aksara, 2004-2011 .....	62
Tabel 4.3 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur, 2004-2011 .....	63
Tabel 4.4 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 1992-2012 .....	64
Tabel 4.5 Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah untuk Sektor Pendidikan Tahun 1992-2012 .....	66
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 1992-2012 .....	68
Tabel 4.7 Perkembangan PDB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1992-2012.....	70
Tabel 4.8 Deteksi Normalitas.....	71
Tabel 4.9 Deteksi Autokorelasi.....	72
Tabel 4.10 Deteksi Multikolinearitas .....	74
Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda.....	75

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia, 2004-2012.....	9
Gambar 2.1 <i>Trade Off</i> Keuangan dalam Pengambilan Keputusan untuk Melanjutkan Sekolah .....	21
Gambar 2.2 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse .....	39
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran .....	48
Gambar 4.1 Deteksi Heteroskedastisitas .....	73

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Hasil Analisis Regresi.....	90
Lampiran B Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	92

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di setiap negara (Mirza, 2012). Meier dan Stiglitz dalam Kuncoro (2010) juga berpendapat bahwa pada generasi kedua, teori pembangunan banyak menekankan pada akumulasi modal sumber daya manusia dengan menciptakan agen-agen pembangunan yang lebih produktif melalui pengetahuan, kesehatan, nutrisi yang lebih baik, dan peningkatan keterampilan.

Teori pertumbuhan baru yang dikemukakan oleh Paul Romer telah memasukan unsur *human capital* dan teknologi sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*), peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat ditunjukkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pada manusia. Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mampu mendorong peningkatan produktivitas kerja sehingga akan mampu membantu dalam mengurangi angka kemiskinan.

Pembangunan sumber daya manusia berkaitan dengan sejumlah dana yang dikeluarkan masa sekarang (saat pembangunan dilakukan) untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam meraih kesempatan memperoleh penghasilan lebih di masa mendatang. Imbalannya adalah tingkat penghasilan yang lebih tinggi, mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Pembangunan manusia merupakan dampak dari pengembangan modal manusia. Sedangkan perbaikan dari modal manusia itu sendiri tidak terlepas dari perbaikan kinerja ekonomi. Dengan kata lain antara perekonomian dan dampaknya terhadap pembangunan manusia memiliki hubungan yang kuat, begitu pula sebaliknya akibat dari perbaikan kualitas manusia tersebut dalam jangka panjang akan menjadikan perekonomian meningkat (Munawwaroh, 2013).

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan yang berkembang pada tahun 90-an yaitu paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*human centered development*). Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan (Widodo dkk, 2011)



Salah satu alat ukur yang lazim digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia. Pada tahun 1990 *United Nation Development Program (UNDP)* memperkenalkan “*Human Development Index (HDI)*” atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan manusia menurut tiga komponen indikator kemampuan yang sangat mendasar yaitu : kesehatan, kualitas pendidikan serta akses terhadap sumber daya ekonomi berupa pemerataan tingkat daya beli masyarakat.

Untuk mengetahui perkembangan IPM Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1. Pada tahun 2012 IPM Indonesia berada pada peringkat 121 dari 187 Negara. IPM Indonesia antara tahun 1980 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan sebesar 49 persen yakni dari 0,422 menjadi 0,629, angka tersebut menunjukkan rata-rata peningkatan sebesar 1,3 persen setiap tahunnya.

**Tabel 1.1**  
**IPM Indonesia Tahun 1980 – 2012**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai IPM</b>
1980	0.422
1985	0.456
1990	0.479
1995	0.525
2000	0.540
2005	0.575
2010	0.620
2011	0.624
2012	0.629

Sumber : UNDP, *Human Development Report*, 2013

Tabel 1.1 memperlihatkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Perkembangan tersebut merupakan hal positif bagi bangsa Indonesia dalam pembangunan sumber daya

manusia, akan tetapi jika dilihat perbandingannya dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia, capaian IPM Indonesia masih cukup rendah. Perbandingan IPM antar negara ASEAN menunjukkan disparitas yang cukup tinggi sejak tahun 1990. Negara-negara dengan nilai IPM tinggi di kawasan ASEAN berturut-turut adalah Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia masing-masing dengan IPM 0,895, 0,855, dan 0,769 untuk tahun 2012. Indonesia berada pada posisi ke 6, dengan nilai capaian sebesar 0,629.

**Tabel 1.2**  
**Nilai dan Peringkat IPM Negara-Negara ASEAN Tahun 2012**

Negara	IPM	
	2012	Ranking
Singapore	0.895	18
Brunai Darussalam	0.855	30
Malaysia	0.769	64
Thailand	0.690	103
Philippines	0.654	114
Indonesia	0.629	121
Vietnam	0.617	127
Cambodia	0.543	138
Leo People's Democratic Republik	0.543	138
Myanmar	0.498	149

Sumber : UNDP, *Human Development Report*, 2013

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkelanjutan berarti suatu negara telah memiliki fundamental pembangunan sumber daya manusia yang tangguh serta dapat dijadikan sebagai salah satu kekuatan untuk menghadapi berbagai ancaman baik dari luar maupun yang datang dari dalam negara itu sendiri. Salah satu ancaman tersebut dapat berupa perdagangan bebas, dimana Indonesia akan melakukan kerja sama perdagangan dengan negara asia lainnya yang dikenal dengan *Asian Economic Community* pada tahun 2015. Untuk itu,

perlu suatu sistem dan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang baik. Peningkatan tersebut bertujuan membuat sumberdaya manusia dapat memperkuat fundamental pembangunan sumberdaya manusia.

Dilihat dari sisi demografi Sumber Daya Manusia Indonesia merupakan salah satu negara yang produktif. Jika dilihat dari faktor usia, sebagian besar penduduk Indonesia atau sekitar 70% nya merupakan usia produktif. Jika dilihat pada sisi ketenaga kerjaan, Indonesia memiliki 118 juta angkatan kerja (BPS, 2013) . Banyaknya jumlah penduduk pada kelompok usia produktif dibandingkan kelompok usia non-produktif dapat memberikan manfaat bagi pembangunan nasional terutama pada sektor ekonomi. Akan tetapi untuk memanfaatkan kondisi tersebut, kualitas SDM harus ditingkatkan secara maksimal antara lain melalui peningkatan tingkat pendidikan untuk kelompok usia produktif baik untuk penduduk desa maupun kota. Menurut UNICEF (2012) untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah tinggi, seseorang membutuhkan keterampilan (*skill*) yang memadai. Keterampilan yang memadai bisa diperoleh melalui pendidikan. Seran (2012) juga berpendapat bahwa pembentukan modal manusia melalui investasi dalam bidang pendidikan merupakan cara terbaik untuk pertumbuhan ekonomi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menempatkan pendidikan sebagai aspek penting dalam pembangunan. Hal itu dibuktikan dengan berbagai usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia sejak orde lama hingga era reformasi. Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan tentang “mencerdaskan kehidupan bangsa,” yang terkait dengan pendidikan. Seberapa

besar komitmen pemerintah terhadap pembangunan pendidikan antara lain tercermin dari anggaran pendidikan yang disediakan dalam APBN. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tertuang di dalam UU No 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa "dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD".

Menurut Mangkoesebroto (2001), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang menetapkan suatu kebijakan tertentu memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut. Untuk mengetahui perkembangan anggaran pemerintah pada bidang pendidikan selama periode 2007-2013 dapat dilihat pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Pendidikan, 2007-2013**  
**(miliar rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan</b>
2007	50.843,4
2008	55.298,0
2009	84.919,5
2010	90.818,3
2011	97.854,0
2012	114.962,7
2013	118,467,1

Sumber : Kementerian Keuangan, 2013

Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa pemerintah terus meningkatkan jumlah investasinya pada sektor pendidikan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, pengeluaran

yang semakin meningkat tersebut masih kecil bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang dapat dilihat pada Tabel 1.4.

**Tabel 1.4**  
**PDB Per Kapita dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan**  
**Negara-Negara ASEAN**

Negara	PDB (2005 PPP miliar dollar)	PDB per kapita (2005 PPP dollar)	Pengeluaran Publik untuk Pendidikan (% PDB)	
	2011	2011	2000	2005- 2010
Singapore	277.8	53,591	3.4	3.3
Brunai Darussalam	18.2	45,507	2.6	2.4
Malaysia	394.6	13,672	6.0	5.8
Thailand	530.6	7,633	5.4	3.8
Philippines	344.4	3,631	3.3	2.7
Indonesia	992.1	4,094	n.a	3.0
Vietnam	264.6	3,013	n.a	5.3
Cambodia	29.8	2,080	1.7	2.6
Leo People's Democratic Republik	15.5	2,464	1.5	3.3
Myanmar	n.a	n.a	0.6	n.a

Catatan : n.a = not available (tidak tersedia)

Sumber : UNDP, *Human Development Report*, 2013

Dari Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa pengeluaran publik untuk bidang pendidikan di Indonesia sebesar 3% dari total PDB, masih cukup rendah bila dibandingkan dengan negara Singapore, Malaysia dan Thailand. Malaysia merupakan negara yang menduduki peringkat pertama dalam hal proporsi pengeluaran untuk pendidikan terhadap PDB yaitu sebesar 5.8% terhadap PDB.

Rumah tangga masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti : makanan, kesehatan, dan

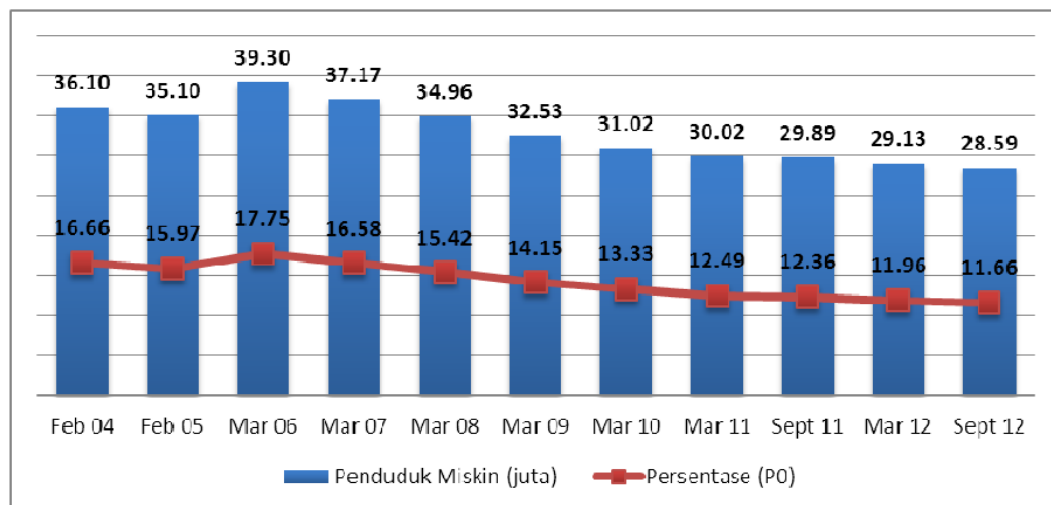
pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya (Ginting, 2008)

Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang bermula dari ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Hal tersebut menjadikan gap pembangunan manusia diantara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik (Mirza, 2012). Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini pada akhirnya akan berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah.

Krisis ekonomi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan bertambahnya penduduk yang hidup di garis kemiskinan. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada periode 2004-2012 jumlah dan persentase penduduk miskin menurun dari tahun 2004 ke 2005. Namun, pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan karena harga barang-barang

kebutuhan pokok saat itu naik tinggi yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen. Namun mulai tahun 2007 sampai 2012 jumlah maupun persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan. Pada September 2012, tingkat kemiskinan tercatat 11,66 persen atau kurang dari 30 juta penduduk miskin secara nasional. Perkembangan tingkat kemiskinan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 ditunjukkan oleh Gambar 1.1.

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Kemiskinan di Indonesia, 2004–2012**



Sumber : BPS, Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) (2013)

Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari proses produksi barang dan jasa yang ada di negara tersebut. Terjadinya kenaikan atau penurunan PDB mengindikasikan terjadinya kenaikan atau penurunan dalam proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Terjadinya kenaikan PDB menunjukkan kegairahan ekonomi suatu negara karena ekonomi di negara tersebut telah bergerak dan berekspansi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara tersebut (Munawwaroh 2013).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dikatakan berhasil apabila laju pertumbuhan PDB lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk negara yang bersangkutan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut akan lebih bermakna pada kehidupan masyarakat. Berdasarkan pada kaitan kedua konsep ekonomi ini pada hakekat pembangunan ekonomi adalah untuk menaikkan tingkat kehidupan masyarakat melalui peningkatan produktifitas perkapita, investasi sumberdaya manusia, investasi fisik dan kesempatan kerja (Mishkin dalam Aimon, 2012). Pertumbuhan ekonomi dicerminkan dari adanya perubahan PDB dari satu periode ke periode berikutnya, yang merupakan salah satu petunjuk nyata pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan keberhasilan implementasi kebijakan.

**Tabel 1.5**  
**PDB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2004-2012**

<b>Tahun</b>	<b>PDB Harga Konstan (miliar)</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>
2004	1.656.516,80	5,0
2005	1.750.815,20	5,7
2006	1.847.126,70	5,5
2007	1.964.327,30	6,3
2008	2.082.456,10	6,0
2009	2.178.850,40	4,6
2010	2.314.458,80	6,2
2011	2.464.676,50	6,5
2012	2.618.139,20	6,2

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa PDB Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2004 sampai tahun 2012. Tahun 2008 terjadi resesi global, tetapi di tahun tersebut perekonomian Indonesia dapat bertahan dengan 2.082 miliar rupiah di tahun 2008 menjadi 2.178 miliar rupiah pada tahun 2009. Akan tetapi



Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi cukup signifikan pada tahun 2009 dari 6,0 persen pada tahun 2008 menjadi 4,6 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2009 terutama disebabkan krisis ekonomi di Amerika Serikat yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hampir di semua negara. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi kembali naik menjadi 6,20 persen dan terus meningkat mencapai 6,5 persen pada tahun 2011 kemudian menurun kembali di tahun 2012 sebesar 6,2 persen.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan pembangunan manusia di Indonesia adalah berkaitan dengan naiknya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan PDB yang meningkat setiap tahunnya tidak sebanding dengan kenaikan pembangunan manusia yang tercermin dari nilai IPM Indonesia yang masih rendah. Selain itu, dalam periode pertumbuhan yang pesat juga terdapat penurunan dalam proporsi masyarakat miskin di Indonesia. Meskipun demikian, peningkatan pembangunan manusia masih lambat seiring dengan terjadinya penurunan proporsi masyarakat miskin sehingga capaian IPM Indonesia masih tergolong rendah.

Berdasarkan fenomena pada latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia?

3. Bagaimana pengaruh PDB terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia
2. Menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia
3. Menganalisis pengaruh PDB terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

1. Menambah pengetahuan pada studi ekonomi sumber daya manusia khususnya dalam hal peningkatan pembangunan manusia dan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan.
2. Memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan, serta hasil dari penelitian ini sebagai referensi atau acuan untuk pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Analisis, serta Penutup. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan pada penelitian.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang mendukung penelitian, kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, serta metode analisis yang digunakan.

##### **BAB IV : HASIL DAN ANALISIS**

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data penelitian dan pembahasan yang menjelaskan estimasi serta interpretasi hasil penelitian.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan keterbatasan dalam penelitian, serta saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Bagian ini menjabarkan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis diantaranya adalah teori pertumbuhan baru, *human capital*, indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah, kemiskinan, dan PDB.

##### **2.1.1. Teori Pertumbuhan Baru : Pertumbuhan Endogen**

Teori pertumbuhan baru mempunyai 2 prinsip penting yaitu : Pertama, beberapa ahli teori pertumbuhan baru telah menfokuskan pada bagian dari kapital manusia, seperti yang dinamakan ahli ekonomi untuk pengetahuan, keterampilan, dan melatih individu. Hubungan antara kapital manusia dan pertumbuhan mengalir dalam dua jalan, pada satu sisi, ketika perekonomian menjadi lebih kaya mereka menjadi lebih condong untuk “invest kepada masyarakat” melalui nutrisi yang berkembang, sekolah, dan *on-the-job training*. Disisi lain tenaga kerja trampil yang lebih sehat dan lebih trampil dan lebih produktif, yang mengarah kepada standar kehidupan yang berkembang. Kedua, teori pertumbuhan baru menekankan kepentingan dari inovasi teknologi oleh perusahaan-perusahaan pribadi sebagai sebuah sumber dari pertumbuhan produktifitas. Perusahaan-perusahaan desain produk dan efisiensi produksi dalam beberapa cara. Jelasnya bagian dari teori pertumbuhan baru ini terkait dengan bagian yang menekan pada formasi kapital manusia, ketika pembangunan dan kegunaan inovasi teknologi memerlukan tenaga kerja terampil. (Waluyo, 2002).

Teori pertumbuhan baru dapat dinyatakan oleh persamaan sederhana  $Y = AK$ . Dalam persamaan tersebut,  $A$  dianggap mewakili semua faktor yang mempengaruhi teknologi, dan  $K$  mencerminkan modal fisik dan sumber daya manusia. Teori pertumbuhan baru mengasumsikan bahwa investasi sektor publik dan swasta dalam sumber daya manusia menghasilkan ekonomi eksternal dan peningkatan produktivitas yang membalikkan kecenderungan hasil yang semakin menurun yang alamiah. Teori pertumbuhan endogen (*endogeneous growth theory*) menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mendorong peran aktif kebijakan publik dalam merangsang pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan sumber daya manusia. Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi publik dan penerimaan dari pajak. (Todaro, 2006: 171-173)

Penganut teori endogen berpendapat bahwa asumsi pengembalian modal konstan (bukan semakin menurun) lebih bermanfaat jika  $K$  diasumsikan secara lebih luas yaitu dengan memandang ilmu pengetahuan sebagai sejenis modal. Ilmu pengetahuan adalah input penting dalam produksi perekonomian baik produksi barang dan jasanya maupun produksi ilmu pengetahuan barunya. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat selama beberapa abad terakhir membuat sebagian ekonom berpendapat bahwa ada pengembalian ilmu yang meningkat (Mankiw, 2006)

Implikasi dari penekanan terhadap pentingnya tabungan dan investasi pada modal manusia oleh teori pertumbuhan baru adalah tidak ada kekuatan yang menyamakan tingkat pertumbuhan antarnegara, serta tingkat pertumbuhan nasional yang konstan dan berbeda antarnegara tergantung pada besarnya tabungan nasional dan tingkat teknologi. Konsekuensinya, bagi negara yang miskin modal manusia dan fisik sulit untuk menyamai tingkat pendapatan per kapita negara yang kaya kapital, walaupun memiliki tingkat tabungan nasional yang sama besar.

Pandangan pemikiran baru dari teori Neo-klasik setelah model solow (*Beyond the Solow model*) mengatakan bahwa, pentingnya transformasi dalam proses pembangunan yang baik tidak hanya terbatas pada peningkatan efisiensi alokasi dan akumulasi faktor (C, L, dan H) saja. Dalam hal ini telah memandang bahwa pendidikan dan keterampilan adalah penting, karena pendidikan tidak hanya mampu meningkatkan faktor H, tetapi juga mampu meningkatkan wawasan faktor H untuk menerima perubahan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (Prasetyo, 2008).

Teori pertumbuhan baru (*The new growth theory*) dipelopori oleh David Romer (1996:128). Model sederhana akumulasi modal fisik, modal manusia dan pertumbuhan. Model menyerupai model solow di mana output mengikuti fungsi :

$$Y(t) = K(t)^{\alpha} H(t)^{\beta} [A(t)L(t)]^{1-\alpha-\beta} \quad (2.1)$$

Dimana :

K = Modal fisik

H = Sumber daya manusia (*Human capital*)

A = Perkembangan teknologi

L = Tenaga kerja

### 2.1.2 Teori *Human Capital*

Menurut Becker dalam Kaufman (2003) menyatakan bahwa modal manusia merupakan sejumlah kegiatan yang memerlukan biaya pada periode saat ini untuk meningkatkan produktivitas di masa yang akan datang. Sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk proses investasi tersebut diantaranya adalah : pendidikan, pelatihan, migrasi, kesehatan, dan mencari pekerjaan. jenis investasi modal manusia yang telah mendapat perhatian yang besar dari para ekonom adalah pendidikan dan pelatihan. Selain sekolah merupakan konsumsi yang baik bagi banyak orang (yaitu seseorang mengejar pendidikan untuk kesenangan dan kepuasan dari pengalaman), juga diperlakukan oleh kebanyakan orang sebagai investasi di masa depan.

Modal sumber daya manusia (*human capital*) merupakan bentuk modal tak berwujud yang meliputi keahlian dan pengetahuan yang dimiliki pekerja atau diserap melalui pendidikan dan pelatihan dan menghasilkan jasa yang bernilai bagi suatu perusahaan dari waktu ke waktu (Case, 2007).

Investasi sumber daya manusia (*human investment*) dapat memperbaiki kualitas sumberdaya manusia dan juga akan mempunyai pengaruh yang sama atau bahkan lebih besar terhadap produksi. Sekolah-sekolah formal, sekolah-sekolah kejuruan, dan program-program latihan kerja serta berbagai pendidikan informal lainnya semuanya diciptakan secara lebih efektif untuk memperbesar kemampuan manusia dan sumberdaya – sumberdaya lainnya sebagai hasil dari investasi



langsung dalam pembangunan gedung-gedung, peralatan dan bahan-bahan (buku-buku, proyektor, peralatan penelitian, alat-alat latihan kerja, mesin-mesin, dan lain-lain). (Arsyad, 2004).

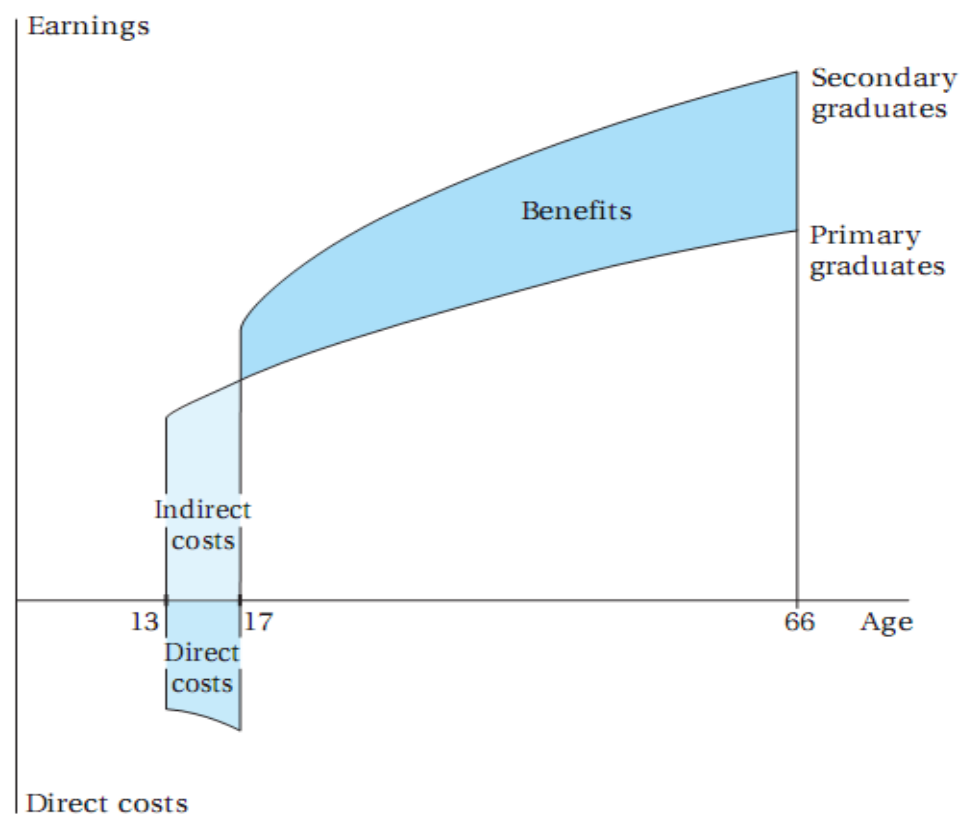
Investasi dalam modal manusia memerlukan biaya yang ditanggung dalam waktu dekat dengan harapan dapat mendapatkan manfaat di masa depan yang akan datang. Secara umum, biaya menambah modal manusia dibedakan menjadi tiga kategori (Ehrenberg, 2003)

1. Biaya langsung, termasuk biaya kuliah dan pengeluaran untuk buku-buku dan perlengkapan lainnya
2. Pendapatan yang hilang yang muncul karena selama periode investasi biasanya tidak mungkin untuk bekerja, setidaknya tidak penuh-waktu
3. Kerugian psikis yang terjadi karena proses pembelajaran sering sulit dan membosankan

Investasi modal manusia sama dengan investasi faktor produksi lainnya. Dalam hal ini juga diperhitungkan *rate of return* (manfaatnya) dari investasi pada modal manusia. Bila seseorang akan melakukan investasi, maka ia harus melakukan analisa biaya manfaat (*cost benefit analysis*). Biayanya adalah berupa biaya yang dikeluarkan untuk bersekolah dan *opportunity cost* dari bersekolah adalah penghasilan yang diterimanya bila ia tidak bersekolah. Sedangkan manfaatnya adalah penghasilan (*return*) yang akan diterima di masa depan setelah masa sekolah selesai. Harapan dari investasi ini adalah memperoleh manfaat yang jauh lebih besar daripada biayanya.

Berdasarkan perspektif investasi modal manusia, keputusan untuk langsung bekerja maupun melanjutkan kuliah di perguruan tinggi terlebih dulu didasarkan pada keuntungan yang diterima dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan selama melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Hal ini dijelaskan pada Gambar 2.1

**Gambar 2.1**  
**Trade Off Keuangan dalam Pengambilan Keputusan untuk**  
**Melanjutkan Sekolah**



Sumber : Todaro (2006)

Gambar 2.1 mengasumsikan bahwa seseorang bekerja dari saat ia lulus sekolah hingga ia tidak mampu bekerja lagi atau meninggal. Lulusan sekolah dasar diasumsikan mulai bekerja pada usia 13, dan lulusan sekolah tingkat atas

diasumsikan mulai bekerja pada umur 17. Bagi seseorang yang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat atas akan mengorbankan 4 tahun pendapatan yang tidak akan diperolehnya karena bersekolah. Disamping itu terdapat biaya langsung seperti biaya sekolah, buku-buku, dan pengeluaran lain yang tidak akan dikeluarkan jika seseorang tidak melanjutkan sekolah. Selama hidupnya, dia akan memperoleh penghasilan yang lebih besar daripada jika ia bekerja dengan berbekal ijazah SD saja.

Manfaat dari adanya pendidikan sebagai investasi pada sumberdaya manusia bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa secara umum dapat dilihat dari pendapat Todaro (2006) diantaranya :

1. Dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, karena adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian ;
2. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas
3. Terciptanya suatu kelompok pemimpin yang terdidik guna mengisi jabatan-jabatan penting dalam dunia usaha maupun pemerintahan ;
4. Tersedianya berbagai macam program pendidikan dan pelatihan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan dalam keahlian dan mengurangi angka buta huruf.

Ranis (2004) memberikan pendapatnya mengenai pembangunan manusia yang memiliki efek penting pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia dapat dilihat sebagai suatu aspek yang mungkin dapat mempengaruhi maksimalisasi keuntungan. Dengan demikian, pembangunan manusia selalu berhubungan dengan modal manusia, sedangkan modal manusia dapat

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sehingga pembangunan manusia akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

### **2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pembangunan Manusia**

Pada tahun 1990 UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam laporannya “*Global Human Development Report*” memperkenalkan konsep “Pembangunan Manusia (*Human Development*)” sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia didefinisikan sebagai perluasan pilihan bagi manusia (*enlarging people’s choices*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/keterampilan mereka. Sebagaimana laporan yang dikeluarkan UNDP (1995), ada beberapa konsep penting mengenai pembangunan manusia yaitu sebagai berikut :

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata.

- c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal.
- d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
- e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Menurut UNDP dalam *Human Development Report* (HDR) 1995 yang menekankan bahwa untuk memperluas pilihan-pilihan manusia, konsep pembangunan manusia harus dibangun dari empat dimensi yang tidak terpisahkan. Berdasarkan konsep di atas maka untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat unsur pokok yang perlu diperhatikan (UNDP 1995) yaitu:

- a. Produktivitas (*Productivity*)

Masyarakat harus mampu untuk meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

- b. Pemerataan (*equity*)

Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus

dihapuskan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari peluang-peluang yang ada.

c. Kestinambungan (*Sustainability*)

Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan bahwa tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua jenis pemodalan baik itu fisik, manusia, dan lingkungan hidup harus dilengkapi.

d. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang memengaruhi kehidupan mereka.

### **2.1.3.2 Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). (BPS, 2008)

#### **2.1.3.2.1 Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka harapan hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (187 negara didunia). Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun. Angka ini diambil dari standar UNDP.

#### **2.1.3.2.2 Tingkat Pendidikan**

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*mean years schooling*) dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua per tiga.

Untuk penghitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (nol). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol

mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum setara lulus Sekolah Menengah Atas.

#### 2.1.3.2.3 Standar Hidup Layak

Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

$$\begin{aligned}
 C(I) &= C_{(i)} & \text{Jika } C_{(i)} < Z \\
 &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{1/2} & \text{Jika } Z < C_{(i)} < 2Z \\
 &= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{1/3} & \text{Jika } 2Z < C_{(i)} < 3Z \\
 &= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(Z)^{1/3} + 4(C_{(i)} - 3Z)^{1/4}, & \text{Jika } 3Z < C_{(i)} < 4Z
 \end{aligned}$$

Dimana

$C_{(i)}$  = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

$Z$  = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp.549.500 per kapita per tahun atau Rp. 1.500 per kapita per hari

Penghitungan indeks daya beli dilakukan berdasar 27 komoditas kebutuhan pokok. Batas maksimum dan minimum penghitungan daya beli digunakan seperti terlihat dalam Tabel 2.1. Batas maksimum daya beli adalah



sebesar Rp 732.720,- sementara sampai dengan tahun 1996 batas minimumnya adalah Rp 300.000,- Pada tahun 2002 dengan mengikuti kondisi pasca krisis ekonomi batas minimum penghitungan PPP diubah dan disepakati menjadi Rp 360.000,-

### 2.1.3.3 Penyusunan Indeks

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X(i,j) = \frac{(X(i,j) - X(i-\min))}{(X(i-\max) - X(i-\min))} \quad (2.2)$$

Dimana :

$X(i,j)$  = Indeks komponen ke-i dari daerah j

$X(i-\min)$  = Nilai minimum dari  $X_i$

$X(i-\max)$  = Nilai maksimum dari  $X_i$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM**

<b>Indikator Komponen IPM</b>	<b>Maksimum</b>	<b>Minimum</b>	<b>Keterangan</b>
Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah	100	0	Standar UNDP
Daya Beli (PPP)	737.720 <sup>a)</sup>	300.000 (1996) 360.000 <sup>b)</sup> (1999, 2002)	UNDP menggunakan PDB Riil disesuaikan

Keterangan : a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018

b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2008

## **2.1.4 Pengeluaran Pemerintah**

### **2.1.4.1 Definisi**

Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah adalah membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. (Sukirno, 2004)

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu :

#### **1. Pengeluaran Rutin**

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan.

## 2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat.

Menurut Dumairy (1999) Pemerintah memiliki 4 peran yaitu :

- Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
- Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar
- Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium.
- Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Empat jenis utama dari pengeluaran publik dinegara maju antara lain: pendidikan, infrastruktur, jaminan sosial dan kesejahteraan, dan perawatan kesehatan. Empat bidang tersebut dipilih berdasarkan lima kriteria:

1. Mewakili komponen utama pengeluaran
2. Melibatkan peran pemerintah pusat maupun daerah

3. Memberikan pengaruh pada sejumlah besar rumah tangga atau masyarakat
4. Menunjukkan tantangan kebijakan yang penting
5. Bidang-bidang tersebut telah berada dalam agenda kebijakan publik selama dua dekade terakhir

Menurut Sukirno (2004) penentu-penentu pengeluaran pemerintah diantaranya :

1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima

Dalam menyusun anggaran belanjanya pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Semakin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, semakin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan

2. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat, misalnya pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur dan mengembangkan pendidikan.

3. Pertimbangan politik dan keamanan

Kekacauan politik, perselisihan di antara berbagai golongan masyarakat dan daerah sering berlaku di berbagai negara di dunia. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar,

terutama apabila operasi militer perlu dilakukan. Ancaman kestabilan dari negara luar juga dapat menimbulkan kenaikan yang besar dalam pengeluaran ketentaraan dan akan memaksa pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan pajak.

#### **2.1.4.3 Teori Pengeluaran Pemerintah**

##### **a. Adolph Wagner**

Pengamatan empiris oleh Adolph Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Ekonom Jerman ini mengukurnya dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Temuannya kemudian oleh Richard A. Musgrave dinamakan “hukum pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat” (*law of growing public expenditures*). Wagner sendiri menamakannya “hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat” (*law of ever increasing state activity*).

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab tersebut adalah : (Dumairy, 1999)

1. Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan
2. Kenaikan Tingkat pendapatan masyarakat
3. Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi
4. Perkembangan demokrasi
5. Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

### **b. Teori Rostow dan Musgrave**

WW Rostow dan RA Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahapan pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total-rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional – relatif besar. Hal itu disebabkan karena pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetap besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri. Banyak terjadi kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan yang menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya (Mangkoesoebroto, 2001)

### **c. Teori Peacock Wiseman**

Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis “dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah”. Pemerintah selalu

berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang kian besar. Mengacu pada teori pemungutan suara (*voting*), mereka berpendapat bahwa masyarakat mempunyai batas toleransi pajak, yakni suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala yang membatasi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak secara tidak semena-mena atau sewenang-wenang.

Menurut Peacock-Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat, yang meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah, pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Jadi dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal tadi terganggu, karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya, timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak lebih besar menyebabkan dana swasta untuk investasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (*displacement effect*).

Jika pada saat terjadinya gangguan sosial dalam perekonomian timbul efek penggantian, maka sesudah gangguan berakhir timbul pula sebuah efek lain yang disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Efek ini menyatakan bahwa gangguan sosial menumbuhkan kesadaran masyarakat akan adanya hal-hal yang perlu

ditangani oleh pemerintah sesudah redanya gangguan sosial tersebut. Kesadaran semacam itu menggugah kesediaan masyarakat untuk membayar pajak lebih besar, sehingga memungkinkan pemerintah beroleh penerimaan yang lebih besar pula. Inilah yang dimaksudkan dengan analisis dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah (Mangkoesoebroto, 2001)

## **2.1.5 Kemiskinan**

### **2.1.5.1 Pengertian Kemiskinan**

Pada tahun 1990, World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimal. Kemudian pada tahun 2004, World Bank menguraikan kembali definisi kemiskinan secara lebih detail yaitu “Kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan adalah ketiadaan tempat tinggal. Kemiskinan adalah sakit dan tidak mampu untuk periksa ke dokter. Kemiskinan adalah tidak mempunyai akses ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana caranya membaca. Kemiskinan adalah tidak mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan datang. Kemiskinan adalah kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, ketiadaan keterwakilan dan kebebasan”.

Menurut UNDP kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi. Namun, kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan dimana kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan atau air minum yang bersih, atau untuk mempengaruhi proses politik dan faktor lainnya yang penting bagi manusia. Dengan kata lain, UNDP memandang kemiskinan



sebagai suatu masalah multidimensi yaitu tidak hanya terbatas pada kekurangan pendapatan dan sumber daya ekonomi.

Kemiskinan menurut Kuncoro (2000) adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit (kemiskinan), perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran. Tingkat standar hidup dalam suatu negara bisa diukur dari beberapa indikator antara lain *Gross National Product* (GNP) per kapita, pertumbuhan relatif nasional dan pendapatan per kapita, distribusi pendapatan nasional, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut Todaro (2006), besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (*poverty line*). Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan di bawah, di mana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Ini adalah suatu ukuran tetap (tidak berubah) di dalam bentuk suatu kebutuhan kalori minimum di tambah komponen-komponen non makanan yang juga sangat diperlukan untuk bertahan (*survive*). Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

Menurut para ahli (antara lain Andre Bayo Ala, 1981) dalam Arsyad (2004), kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan asset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan, serta keterampilan dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

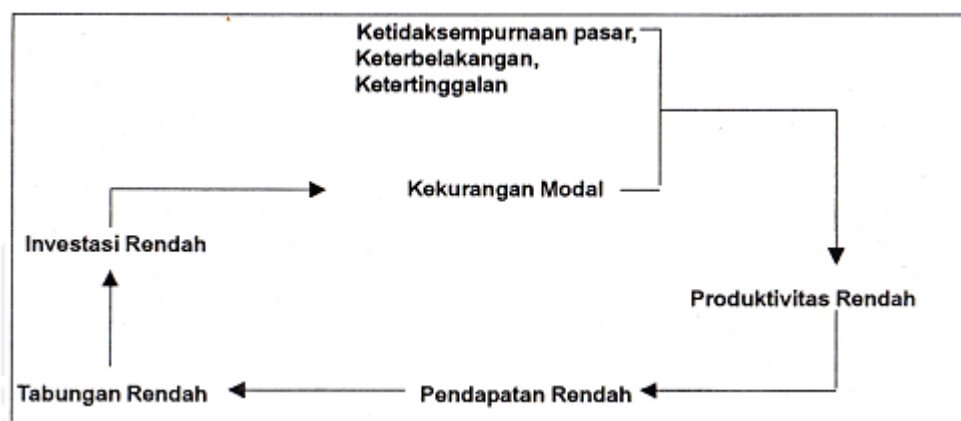
#### **2.1.5.2 Penyebab Kemiskinan**

Sharp, et.al dalam Kuncoro (2006) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, ekonom pembangunan ternama, di tahun 1953, yang mengatakan: “*a poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

**Gambar 2.2**  
**Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse**



Sumber : Kuncoro, 2006

Dilihat dari penyebabnya, kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu (Suparmono, 2004)

1. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena kultur, budaya, atau adat istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang merasa cepat puas akan sesuatu

yang telah dicapai, sifat bermalas-malasan, dan cara berpikir masyarakat yang kurang rasional dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan.

## 2. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam yang kurang menguntungkan sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk mencapai kesejahteraan. Kondisi alam yang kurang menguntungkan berupa tanah yang tandus, letak daerah yang terpencil, tidak adanya sumber daya mineral dan non-mineral, serta miskinnya fasilitas-fasilitas publik yang dibutuhkan.

### 2.1.6 Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (BPS, 2013)

Untuk menghitung angka-angka PDB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

### **1. Menurut Pendekatan Produksi**

PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

### **2. Menurut Pendekatan Pendapatan**

PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

### **3. Menurut Pendekatan Pengeluaran**

PDB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
2. Pengeluaran konsumsi pemerintah
3. Pembentukan modal tetap domestik bruto
4. Perubahan inventori, dan
5. Ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

#### **2.1.7 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Investasi sumberdaya manusia yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari adanya pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dengan adanya bantuan dari pemerintah semua masyarakat bisa memperoleh pendidikan yang layak terutama bagi masyarakat miskin. Investasi ini memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga akan mendorong peningkatan sumber kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan.

Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya

pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai tujuan tersebut (Meier, et al dalam Aimon, 2012)

#### **2.1.8 Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut Mahmudi (2007) dalam widodo dkk (2011), dalam suatu lingkaran setan kemiskinan terdapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin yaitu 1) rendahnya tingkat kesehatan, 2) rendahnya pendapatan, dan 3) rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat kesehatan merupakan salah satu pemicu terjadinya kemiskinan karena tingkat kesehatan masyarakat yang rendah akan menyebabkan tingkat produktivitas menjadi rendah. Tingkat produktivitas yang rendah lebih lanjut menyebabkan pendapatan rendah, dan pendapatan yang rendah menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemiskinan itu selanjutnya menyebabkan seseorang tidak dapat menjangkau pendidikan yang berkualitas serta membayar biaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut kemiskinan sangat berpengaruh terhadap pembangunan manusia, di mana dalam lingkaran kemiskinan terdapat tiga indikator pembangunan manusia yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli yang tidak mampu untuk dicapai oleh masyarakat miskin. ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia

Rendahnya kualitas sumber daya manusia mengakibatkan kualitas kehidupan masyarakat yang rendah pula yang selanjutnya mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas masyarakat. Rendahnya produktivitas akan berakibat pada rendahnya pendapatan masyarakat sehingga akumulasi tabungan masyarakat juga akan rendah. Kondisi ini berakibat pada rendahnya investasi produktif karena sebagian dana yang digunakan untuk investasi diperoleh dari tabungan masyarakat yang pada gilirannya kembali mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi inilah yang membentuk lingkaran yang tidak jelas awal dan akhirnya sehingga kondisi ini sering disebut lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). (Suparmono, 2004)

### **2.1.9 Pengaruh PDB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut Case (2007) peningkatan PDB bisa berasal dari 1) peningkatan penawaran tenaga kerja, 2) peningkatan modal fisik atau sumber daya manusia, 3) peningkatan produktivitas (jumlah produk yang diproduksi oleh masing-masing unit modal atau tenaga kerja).

Munawwaroh (2013) mengatakan bahwa terjadinya kenaikan PDB menunjukkan kegairahan ekonomi suatu negara karena ekonomi di negara



tersebut telah bergerak dan berekspansi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan negara tersebut. Peningkatan PDB akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan yang diterimanya. Ketika tingkat pendapatan atau PDB per kapita naik akibat dari PDB yang meningkat, menyebabkan pengeluaran masyarakat untuk peningkatan pembangunan manusia menjadi naik.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Denni Sulistio Mirza (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Jenis data yang digunakan adalah data panel periode tahun 2006-2009 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode Regresi Data Panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kemiskinan mempunyai pengaruh negatif terhadap IPM Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap IPM di Jawa Tengah. Dan Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah berpengaruh positif pada IPM di Jawa Tengah.

Munawwaroh (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Sumberdaya Manusia dan Perekonomian Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini adalah uji kointegrasi dan kausalitas granger. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, tingkat

pendidikan dan perekonomian berpengaruh signifikan terhadap kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Jambi.

Secara parsial anggaran pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas sumberdaya manusia. Anggaran kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas sumberdaya manusia. Perekonomian berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas sumberdaya manusia. Variabel inflasi, pengangguran dan kualitas sumberdaya manusia secara bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap perekonomian di Provinsi Jambi. Secara parsial inflasi berpengaruh signifikan terhadap perekonomian dan arahnya negatif. Pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perekonomian. Kualitas sumberdaya manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perekonomian.

Sazli Mauriza, dkk (2013). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Propinsi Aceh. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data panel yaitu dengan menggabungkan data tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 atas dua kawasan yang terdiri dari 7 Kabupaten di Kawasan Barat dan 7 Kabupaten/Kota di kawasan timur. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Propinsi Aceh.

Hasdi Aimon (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Produktivitas, Investasi Sumberdaya manusia, Investasi Fisik, Kesempatan Kerja Terhadap

Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia akan mampu direduksi secara signifikan oleh investasi pendidikan, investasi kesehatan, produktivitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang optimis. Apabila investasi pendidikan dan investasi kesehatan meningkat, maka produktivitas masyarakat juga akan meningkat dan selanjutnya tingkat kemiskinan akan menurun. Sedangkan produktivitas, investasi fisik, dan kesempatan kerja meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, sementara apabila tingkat kemiskinan meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan tereduksi.

Adi Widodo, dkk (2011). Penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Periode penelitian adalah tahun 2007-2008. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah sektor publik tidak secara langsung mempengaruhi IPM ataupun kemiskinan, namun secara bersama-sama (simultan) pengeluaran sektor publik dan IPM dapat mempengaruhi kemiskinan. IPM juga berperan sebagai variabel interveting (tahun 2008), dalam kaitannya dengan hubungan antara pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan dengan pengentasan kemiskinan. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan akan dapat mempengaruhi kemiskinaan jika pengeluaran tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Permasalahan rendahnya kualitas sumber daya manusia masih terjadi di Indonesia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh masih tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dicapai oleh masyarakat. Rendahnya kualitas sumber daya manusia terlihat dari capaian nilai indeks pembangunan manusia yang rendah bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, dimana Indonesia berada di peringkat 121 dengan nilai capaian 0.629.

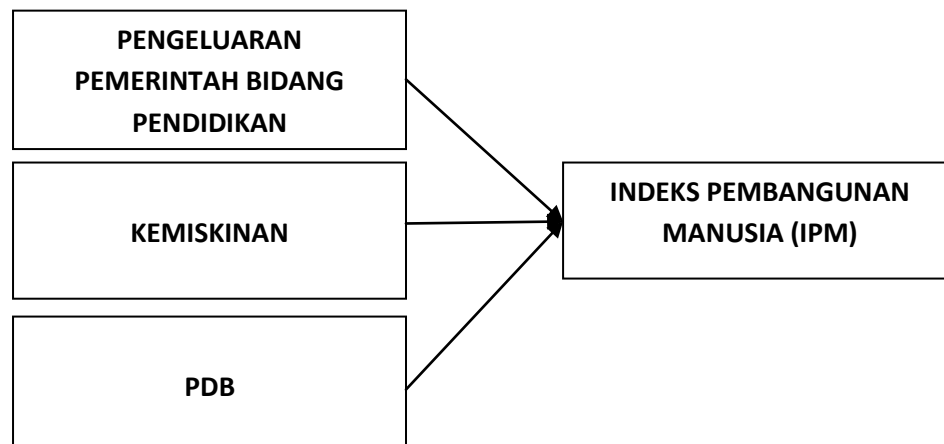
Diperlukan adanya campur tangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Campur tangan pemerintah bisa dilakukan dengan adanya pengeluaran publik (*public spending*). Pengeluaran publik dilakukan dengan tujuan investasi pada sumber daya manusia dengan harapan bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pada masa yang akan datang. Investasi publik di bidang pendidikan merupakan bagian dari pengeluaran publik yang dilakukan oleh pemerintah. Investasi pada pendidikan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga akan menambah sumber daya manusia yang terampil. Meningkatnya tingkat pendidikan yang dicapai seseorang akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Mauriza, dkk (2013) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dengan indeks pembangunan manusia. Penelitian lain yang dilakukan

oleh munawwaroh (2013) juga menunjukkan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas sumberdaya manusia

Pengentasan penduduk miskin masih menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Meskipun sudah banyak program kemiskinan yang ditujukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, tetapi kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Sulitnya penyelesaian masalah ini salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hubungan kemiskinan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia telah dijelaskan oleh Suparmono (2004). Penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2012) menunjukkan bahwa Kemiskinan mempunyai pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dimana bila terjadi penurunan tingkat kemiskinan maka indeks pembangunan manusia akan meningkat.

PDB yang tinggi akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya PDB akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Pendapatan yang tinggi membuat masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan. Masyarakat dapat mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan baik. Hal tersebut akan mempengaruhi naiknya capaian indeks pembangunan manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur dari laju pertumbuhan PDRB mempunyai pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Berdasarkan studi kepustakaan dan penelitian terdahulu maka dapat digambarkan skema penelitian:

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, kerangka pemikiran terhadap rumusan masalah, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Diduga anggaran pemerintah dibidang pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.
- 2) Diduga kemiskinan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia.
- 3) Diduga PDB berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

##### **3.1.1. Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Dan untuk variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggaran pemerintah bidang pendidikan, kemiskinan, dan PDB.

##### **3.1.2. Definisi Operasional Variabel**

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu (1) Indeks Harapan Hidup, yang diukur dengan angka harapan ketika lahir; (2) Indeks Pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; (3) Indeks Pendapatan, yang diukur dengan daya beli konsumsi per kapita. Nilai indeks pembangunan manusia Indonesia yang dinyatakan dalam persen pertahun.

2. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (Ed) adalah besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total APBN yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan diwakili dengan jumlah pengeluaran pembangunan untuk sektor pendidikan dan kebudayaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 1992-2004. Selanjutnya pada tahun 2005-2012 diwakili oleh belanja negara menurut fungsi pendidikan. Anggaran pendidikan dinyatakan dalam miliar rupiah per tahun.
3. Kemiskinan (POV) dapat dilihat melalui penduduk yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kalori dan kebutuhan non makanan yang mendasar. Dalam penelitian ini menggunakan jumlah penduduk miskin kota dan desa.
4. PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dalam penelitian ini digunakan pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan 2000.

### **3.2. Jenis dan Sumber data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Departemen Keuangan, United Nations Development Programme (UNDP) , dan Badan Pusat Statistik, internet, serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang digunakan merupakan data runtun waktu (*time series*) tahunan. Data *time series* adalah sebuah kumpulan observasi terhadap nilai-nilai sebuah variable dari beberapa periode waktu yang berbeda.



Data seperti ini bisa dikumpulkan pada sebuah interval periode yang regular, seperti harian, mingguan, bulanan, kuartalan, tahunan, lima tahunan, atau sepuluh tahunan (Gujarati, 2010). Data yang digunakan adalah periode tahun 1992-2012. Pemilihan periode ini disebabkan karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baru dikembangkan pada tahun 1990an dan pada periode tersebut terjadi dua kali krisis ekonomi yang mengakibatkan turunnya PDB yang diikuti dengan peningkatan kemiskinan di tahun 1998.

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a) Data Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 1992-2012
- b) Data pengeluaran pemerintah sektor pendidikan Indonesia tahun 1992-2012
- c) Data penduduk miskin Indonesia tahun 1992-2012
- d) Data PDB Indonesia tahun 1992-2012

### **3.3. Metode Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk tahunan dari Badan Pusat Statistik, Departemen Keuangan, dan United Nations Development Programme (UNDP).

### 3.4. Metode Analisis

#### 3.4.1. Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) maka penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS). Analisis regresi adalah studi ketergantungan dari variabel dependen pada satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi dan nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2010). Menurut Ghazali (2006) dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Model yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan dalam fungsi sebagai berikut :

$$IPM_t = a + b_1 Ed_t + b_2 POV_t + b_3 PDB_t + e \quad (3.1)$$

Keterangan :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (persen)

Ed = Anggaran Pendidikan (miliar rupiah)

POV = Kemiskinan (juta jiwa)

PDB = Produk Domestik Bruto (miliar rupiah)

e = *error term*

### **3.4.2. Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik**

#### **3.4.2.1. Deteksi Normalitas**

Deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2006).

Uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi normalitas adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

$H_0$  : Data residual berdistribusi normal

$H_A$ : Data residual tidak berdistribusi normal

#### **3.4.2.2. Deteksi Autokorelasi**

Deteksi Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. (Ghozali, 2006).

Dalam penelitian ini, mendeteksi autokorelasi dilakukan dengan Run Test. Run Test sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual

tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random.

#### **3.4.2.3. Deteksi Heteroskedastisitas**

Deteksi Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Deteksi heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik scatterplot antara nilai terikat dengan residualnya. Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu serta titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka dapat disimpulkan data bebas dari heteroskedastisitas.

#### **3.4.2.4. Deteksi Multikolinearitas**

Deteksi multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2006).

Multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance antar variabel independen. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adanya nilai  $Tolerance \leq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ .

### 3.4.3. Uji Statistik

Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ), pengujian signifikansi simultan (uji F), dan pengujian signifikansi individu (uji t).

#### 3.4.3.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2006).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted  $R^2$  untuk mengevaluasi mana model regresi terbaik. Dalam kenyataan nilai adjusted  $R^2$  dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2010) jika dalam uji empiris didapat nilai Adjusted  $R^2$  negatif, maka nilai adjusted  $R^2$  dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai  $R^2 = 1$ , maka adjusted  $R^2 = R^2 = 1$  sedangkan jika nilai  $R^2 = 0$ , maka adjusted  $R^2 = (1 - k)/(n - k)$ . Jika  $k > 1$ , maka adjusted  $R^2$  akan bernilai negatif.

### 3.4.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Untuk pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ , artinya semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

$H_1 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 > 0$ , artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Nilai F hitung dapat diperoleh dengan rumus :

$$F\text{-hitung} = \frac{R^2/(K-1)}{(1-R^2)/(N-K)} \quad (3.2)$$

Dimana :

$R^2$  = Koefisien determinasi

K = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = Jumlah observasi

Kriteria pengambilan keputusan :

1.  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak apabila  $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ , yang artinya variabel penjelas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

2.  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

#### 3.4.3.3. Uji Signifikansi Individu (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- i. Uji t untuk variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (Ed)
  - a)  $H_0 : \beta_1 \leq 0$  (tidak ada pengaruh antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia)
  - b)  $H_1 : \beta_1 > 0$  (ada pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia)
- ii. Uji t untuk variabel tingkat kemiskinan (POV)
  - a)  $H_0 : \beta_2 \geq 0$  (tidak ada pengaruh antara tingkat kemiskinan dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia)
  - b)  $H_1 : \beta_2 < 0$  (ada pengaruh negatif antara tingkat kemiskinan dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia)
- iii. Uji t untuk variabel Produk Domestik Bruto (PDB)
  - a)  $H_0 : \beta_3 \leq 0$  (tidak ada pengaruh antara PDB dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia)
  - b)  $H_1 : \beta_3 > 0$  (ada pengaruh positif antara PDB dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia)

Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel.

Adapun rumus untuk mendapatkan t hitung adalah sebagai berikut :

$$t\text{-hitung} = \frac{b_i - b}{s_{b_i}} \quad (3.3)$$

Dimana :  $b_i$  = koefisien variabel independen ke-i

$b$  = nilai hipotesis nol

$s_{b_i}$  = simpangan baku dari variabel independen ke-i

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
2. Jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.